PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

SKRIPSI

NAMA: ZALEHA
NIM: 18622142

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
2023

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas danMemenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

NAMA: ZALEHA
NIM : 18622142

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
2023

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : ZALEHA
NIM : 18622142

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1028117701 / Lektor

Pembimbing Kedua,

Afriyadi, S.T.,M.E
NIDN. 1003057101 / Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Hendy Satria, S.E., M.Ak.,CAO
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Yang dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : ZALEHA
NIM : 18622142

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDK. 1028117701 / Lektor

Sekretaris,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

Anggota,

Novi Chandra Saputra, SE., M.Ak
NIDK. 8968410021 / Lektor

Tanjungpinang, 12 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama	:	Zaleha
NIM	:	18622142
Tahun Angkatan	:	2018
Indeks Prestasi Komulatif	:	3,15
Program Studi /Jenjang	:	Akuntansi Strata – I (Satu)
Judul Skripsi	:	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila terdapat dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 05 Januari 2023

Penyusun,

ZALEHA

NIM : 18622142

HALAMAN PERSEMBAHAN

alhamdulillah hirobbil 'alamin, Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat yang diberikan untuk penulis, sehingga tiada alasan untuk penulis berhenti bersyukur

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

"orangtuaku"

Ucapan banyak terima kasih kepada orang tua, yaitu Ayah tersayang. Mamak dan Papa (tiri) yang telah memberikan doa, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

"Adik-adikku"

Ucapan terima kasih kepada atas semua doa, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

"Almamaterku tercinta"

STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG tempat aku menuntut ilmu

HALAMAN MOTTO

"Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan,
memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan"

- Tan Malaka

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program strudi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyususnan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikankritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria., SE., M.Ak.,CAO selaku Ketua Program Studi S1 yang telah memberikan pengarahan dan tentang penelitian ini dengan baik
6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak., CA selaku Ketua Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran, serta membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Afriyadi, S.T., M.E selaku Pembimbing II yang sudah bersedia memberikan waktu, dan saran penulisan penelitian kepada peniliti agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Orangtua, Untuk Ayah tersayang. Mama tercinta dan Papa (tiri) yang telah memberikan do'a dan semangat, serta adik-adikku tersayang Zahrima, Zain Hamizan, menjadi alasanku tetap semangat, tak putus asa dan memberikan contoh yang baik untuk adik-adikku.
10. Seseorang yang selalu menemaniku, memberi semangat dan dukungan R.K.A serta Teman-teman seperjuangan angkatan 2018, Winda Fitriana, Qurratu Aini, Andi Tita Apriyanti, Novia Destaliza dan Almurezki.
11. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, yang tak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 05 Januari 2022

ZALEHA

NIM : 18622142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xv

DAFTAR GAMBAR..... xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

ABSTRAK xviii

***ABSTRACT* ..... xix**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 6

1.3. Tujuan Penelitian 6

1.4. KegunaanPenelitian..... 6

1.4.1. Kegunaan Ilmiah 6

1.4.2. Kegunaan Praktis..... 6

1.5. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori..... 9

2.1.1. Sistem Akuntansi..... 9

2.1.1.1. Pengertian Sistem Akuntansi 9

2.1.1.2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 14

2.1.1.3. Indikator Sistem Keuangan Daerah 16

2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan Daerah..... 17
2.1.2.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan..... 17
2.1.2.2. Pengertian Laporan Keuangan 18
2.1.2.3. Indikator Laporan Keuangan..... 19
2.2. Hubungan Antar Variabel 21
2.2.1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 20
2.3. Kerangka Pemikiran..... 23
2.4. Hipotesis..... 24
2.5. Penelitian Terdahulu 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian..... 30
3.2. Jenis dan Sumber Data..... 30
3.2.1.1. Data Primer 31
3.2.1.2. Data Sekunder..... 31
3.3. Populasi dan Sampel 32
3.3.1.1. Populasi..... 32
3.3.1.2. Sampel..... 34
3.4. Definisi Operasional Variabel..... 36
3.5. Teknik Pengumpulan Data..... 37
3.6. Teknik Pengolahan Data 39
3.7. Teknik Analisis Data..... 40
3.7.1 Uji Kualitas Data..... 40
3.7.2 Uji Asumsi Klasik 41
3.7.3 Uji Regresi Linear Sederhana..... 43
3.7.4 Uji Hipotesis..... 44
3.7.5 Koefisien Determinasi (R^2) 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian 46

4.1.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang 46
4.1.1.1 Visi dan Misi Kota Tanjungpinang 49
4.1.2 Penyajian Data..... 49
4.1.2.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 49
4.1.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usia..... 50
4.1.2.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan 51
4.1.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 52
4.1.3 Analisis Deskriptif..... 53
4.1.3.1 Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah..... 54
4.1.3.2 Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... 59
4.1.4 Analisis Data 64
4.1.4.1 Uji Validitas 64
4.1.4.2 Uji Reliabilitas..... 65
4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik 66
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas..... 68
4.1.3.3 Uji Hipotesis 71
4.2. Pembahasan..... 74

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 77
5.2. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Populasi Penelitian	32
2.	Sampel Penelitian	34
3.	Definisi Operasional Variabel	36
4.	Kuisioner Penelitian	38
5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
6.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usia	50
7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	51
8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	52
9.	Tanggapan Responden Tentang Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	54
10.	Tanggapan Responden Tentang Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59
11.	Hasil Uji Validitas	64
12.	Hasil Uji Reliabilitas	65
13.	Hasil Uji Normalitas	66
14.	Hasil Uji Multikolinearitas	68
15.	Uji T	71
16.	Uji Koefisien Determinasi R^2	73

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	23
2.	Uji Normalitas P-Plot	66
3.	Uji Heteroskedastisitas	70

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Lampiran

Lampiran 1 : Kuesioner

Lampiran 2 : Data Tabulasi

Lampiran 3 : Hasil Pengolahan SPSS

Lampiran 4 : Dokumentasi

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Zaleha 18622142. Akuntansi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Email : azaleaa889@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Tanjungpinang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif berupa bilangan terbagi dalam dua kelompok yaitu data diskrit yaitu data yang diperoleh melalui hasil proses menghitung atau membilang dan data kontiniu yaitu data yang diperoleh melalui proses mengukur

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan studi Pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditunjukkan dari hasil uji t hitung lebih besar dari nilai t tabel (5.949>2.0427) atau probabilitas t lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) maka **Ha diterima** pada taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik. Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan

Sebaiknya Pemerintah kota Tanjungpinang juga perlu memperhatikan aspek lain dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan diantaranya penerapan standar akuntansi pemerintah. Selain itu laporan keuangan Pemerintah kota Tanjungpinang sebaiknya dibuat setiap hari dan diserahkan sesuai dengan kebutuhan informasi keuangan agar memberikan informasi keuangan secara maksimal untuk pemakainya

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Dosen Pembimbing I : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA
Dosen Pembimbing II : Afriyadi, S.T.,M.E.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON THE QUALITY OF GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS IN THE TANJUNGPINANG GOVERMENT

Zaleha 18622142. *Accounting* (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Email :

The purpose of this study was to determine the effect of the regional financial accounting system on the quality of financial reports in the Tanjungpinang city government. This research is included in the type of quantitative research in the form of numbers divided into two groups, namely discrete data, namely data obtained through the process of counting or counting and continuous data, namely data obtained through the process of measuring

In this study data collection will be carried out by distributing questionnaires and literature study.

The results showed that the regional financial accounting system has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports as indicated by the results of the t-count test that is greater than the value of t-table (5.949> 2.0427) or the probability t is less than 0.05 (0.000 <0.05) then Ha is accepted at a significance level of 0.05. This shows that the higher the implementation of the regional financial accounting system, the better the quality of regional financial reports will be. In order to obtain relevant, reliable and trustworthy financial reports, the government must have a reliable accounting system. A weak accounting system causes the resulting financial reports to be less reliable and less relevant for decision making

Tanjungpinang city government should also pay attention to other aspects in improving the quality of financial reports, including the application of government accounting standards. In addition, the financial reports of the Tanjungpinang City Government should be made every day and submitted in accordance with the needs of financial information in order to provide maximum financial information for its users..

.

Keywords : *Regional Financial Accounting System, Report Quality Government Finance*

Advisor I : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA
Advisor II : Afriyadi, S.T., M.E.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi akibat pengaruh globalisasi yang begitu pesat yang diikuti dengan perkembangan sistem informasi yang berbasis teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang bisnis. Perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap sistem informasi akuntansi, khususnya dalam pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual digantikan dengan sistem komputer sebagai alat pemrosesan data. Penggunaan teknologi informasi di era sekarang ini merupakan elemen penting dalam aktivitas institusi. Sistem informasi membawa pengaruh besar terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan bisnis, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Perkembangan sistem informasi juga perlu didukung oleh banyak faktor keberhasilan implementasi aplikasi sistem informasi pada suatu institusi dipengaruhi dari cara sistem itu dijalankan, tingkat kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Setiap institusi dituntut untuk melakukan perubahan di bidang teknologi sehingga nantinya mampu memberikan peluang untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Penggunaan teknologi informasi dalam menunjang penerapan sistem informasi pada suatu institusi membawa pengaruh terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas institusi. Kinerja keuangan merupakan usaha formal

yang telah dilakukan oleh institusi yang dapat mengukur keberhasilan instansi dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik institusi dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20l9 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. Kemudian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akutansi pemerintah. Selain berpedoman pada sistem akuntansi keuangan daerah penyusunan laporan juga berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 standar akuntansi merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat penting dimana dapat mengambarkan kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Laporan keuangan untuk tujuan umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna seperti masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang tepat dan jelas bagi penggunanya. Jika informasi dan laporan keuangan dapat dipahami dan dimengerti oleh penggunanya, maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 antara lain: (1) relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value, predictive value*, tepat waktu dan lengkap, (2) andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netral, (3) dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan antar-periode dan antar unit-pemerintahan, (4) dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna.

Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan sistem akuntansi keuangan daerah dimana dapat diketahui bahwa sistem yang digunakan untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah harus diperhatikan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada penelitian yang dilakukan oleh Apandi (2018) dimana pada pemerintah Kabupaten Bandung selalu ditemukan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kecurangan dan ketidakpatuhan yang material oleh BPK. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas salah satunya adalah harus disajikan secara andal. Andal disini berarti bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan secara jujur dan dapat diverifikasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Mustika (2020) dimana penyusunan laporan keuangan pemerintah, banyak sekali permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangannya. Dalam laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, BPK menemukan 18 kelemahan yaitu diantaranya 13 kelemahan terkait sistem keuangan daerah.

Laporan keuangan yang baik harus sesuai dengan standar. Standar dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang mana merupakan sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keaungan pemerintah. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun pada

kenyataannya terdapat yang belum paham mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan juga standar akuntansi pemerintahan tersebut.

Hal yang mendasar dan penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pemahaman akan standar yang diterapkan. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya dasar peraturan tentang standar akuntansi pemerintahan, pemerintah harus dapat menerapkan standar akuntansi pemerintahan sebagai landasan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas dalam rangka menciptakan pemerintah yang baik. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh badan pemeriksa keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Hal-hal yang penting tersebut di atas merupakan fenomena penelitian yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul "**Pengaruh Sistem Akuntansi**

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini akan berguna untuk perkembangan ilmu akuntansi seperti menguatkan teori, mengembangkan teori bahkan membantah teori, dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan.

1.4.2. Kegunaan praktis

Adapun kegunaan dalam penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaruh

sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berkenaan tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Bagian utama skripsi dibagi secara logis dalam bab-bab dan sub bab tergantung pada sifat masalah yang diteliti. Secara konsisten pembagiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan secara garis besar keterkaitan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai pedoman atau landasan konseptual dalam pemecahan masalah. Teori-teori ini diambil dari berbagai sumber dokumenter dan buku rujukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasaan yang dilakukan penulis. Kemudian penulis akan melakukan pengolahan data sesuai teknik yang telah dijabarkan pada bab III.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah sebelumnya, serta saran-saran mengenai perbaikan yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Sistem Akuntansi

2.1.2.1. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut (Mulyadi, 2016), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Sedangkan menurut (Krismiaji, 2015), sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan.

Sistem akuntansi menurut Howard F Stettler (Juita, 2016) adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh managenen untuk mengawasi usahanya, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.

Menurut (Mulyadi, 2016) terdapat lima unsur pokok di dalam sistem akuntansi, yaitu:

1. Formulir

   Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, cek, dan lain-lain.

2. Jurnal

   Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain.

3. Buku Besar

   Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

4. Buku Pembantu

   Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Sebagai contoh buku pembantu piutang yang merinci semua data tentang debitur

5. Laporan Keuangan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, dan lain-lain

Menurut (Mardjono & Gamayanto, 2013) mengatakan bahwa: “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”. Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-phak eksternal entitas pemerintah daerah. Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain, dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya

disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (H. Edward, 2016). Jadi akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Di dalam pengertiannya, akuntansi keuangan daerah tidak terlepas dari pengertian secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai Akuntansi Pemberian Jasa (*Service Activity*) untuk menyediakan informasi kepada para pengguna (*user)* dalam rangka pengambilan keputusan (Zulyani, 2017). Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan.

Menurut *American Accounting Association* yang mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi, maka dapat diketahui bahwa akuntansi terdiri atas beberapa tahap. setelah tahap terakhir selesai, maka selanjutnya akan berputar kembali ke tahap pertama, dan terus seperti itu. Dengan kata lain, akuntansi adalah suatu siklus atau urutan tahap-tahap yang terus berulang. Pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Menurut (Halim & Kusufi, 2017) akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai: “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-

pihak yang memerlukan.” Pada hakikatnya, sifat transaksi pemerintahan/daerah sama dengan transaksi perusahaan, meskipun terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis transaksi. Akuntansi keuangan daerah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan akuntansi bisnis.

Menurut (Halim, 2012) mengatakan bahwa: “Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset” Adapun menurut Erlina Rasdianto (2013) mengatakan bahwa: “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”.

Sementara menurut (Iqbal *dkk.*, 2021) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: “Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah”.

Dari definisi-definisi di atas penulis mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Keungan Daerah merupakan suatu sistem yang mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, serta pelaporan baik secara manual, maupun komputerisasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

dan anggaran lain terkait keuangan daerah. Berbagai definisi di atas dapat dilihat bahwa sistem akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai alat pembantu bagi pemimpin dalam memimpin dan mengendalikan suatu perusahaan, baik perusahaan kecil, maupun perusahaan besar.

2.1.2.2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Namun, untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik, menurut (Bastian, 2013) perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.
3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapan-tahapan tersebut adalah (Bahri, 2016):

1. Dokumentasi transaksi keuangan dalam buku dan melakukan analisis keuangan transaksi tersebut.
2. Pencatatan transaksi kedalam buku jurnal.
3. Meringkas (memposting) transaksi keuangan yang telah dijurnal kedalam buku besar.
4. Menentukan saldo buku besar di akhir periode dan memindahkan saldo-saldo buku besar dalam neraca saldo.
5. Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling terbaru.
6. Menentukan neraca saldo setelah disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Halim (2015) adalah sebagai berikut: “Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan

transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi)".

2.1.2.3. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut (Abdul Halim, 2014) adalah sebagai berikut: "Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi)". Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa proses pokok dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian

   Tahap ini merupakan tahap yang paling pertama dari tahapan siklus akuntansi yakni dengan cara mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan menangkap peristiwa yang memenuhi syarat sebagai transaksi.

2. Pengukuran

   Pengukuran merupakan salah satu fungsi penting dan krusial di akuntansi. Pengukuran yang tidak tepat ataupun tidak akurat akan menghasilkan informasi keuangan yang salah atau tidak tepat.

3. Pencatatan

Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basic* untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

4. Pelaporan

Setelah semua proses selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas menurut (Haryanto, 2013) diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi.

Menurut (Annisa, 2014) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah diketahui laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

2.1.3.2. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (V. Wiratna Sujarweni, 2019) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan. Menurut (Kasmir, 2015), "Laporan keuangan merupakan laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan pada suatu perusahaan yang terjadi saat ini atau periode yang akan datang". Laporan keuangan terdiri dari neraca dan suatu perhitungan laba-rugi dari hasil operasi perusahaan dengan laporan yang berkaitan dengan perubahan ekuitas pada suatu perusahaan.

Sedangkan menurut (Sugiono & Edi, 2016), laporan keuangan merupakan sebuah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama (neraca dan laporan laba-rugi), yang disusun dengan tujuan untuk penyedia informasi keuangan pada perusahaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Menurut (Munawir, 2014) laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan keuangan dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan pehitungan laporan laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama tertentu, dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting bagi perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data yang terdiri dari neraca, dan perhitungan laba-rugi serta keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya.

2.1.3.3. Indikator Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

1. Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses penampilan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Penerapan sistem akuntansi keuangan pada suatu pemerintahan daerah apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan berkualitas. Begitu sebaliknya jika penerapan sistem keuangan diterapkan oleh suatu entitas ataupun pemerintahan daerah dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas dan bagus.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang andal, yang biasa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Menurut Mardiasmo (2012), untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patra dkk (2015) dengan judul pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Menunjukan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan jurnal Alvira Nur Fahirah (2021) Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan. Kemudian dalam jurnal Verliani Dasmaran (2018) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif sangat kuat antara Sistem Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,974. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki hubungan sangat kuat dan memiliki arah yang positif yang berarti apabila sistem akuntansi keuangan daerah baik maka kualitas laporan keuangan daerah juga akan semakin baik, Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dan menunjukkan bahwa jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah semakin baik maka akan diikuti dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang baik pula. Dilihat seberapa besar kontribusi antara variabel X (sistem akuntansi pemerintah) terhadap Variabel Y (kualitas laporan keuangan) yaitu sebesar 94,8% dan sisanya 6,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Di antaranya faktor ekspektasi kinerja, faktor sistem informasi, faktor sistem keuangan, faktor efektivitas kinerja. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial, sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa dengan penerapan sistem akuntansi daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian-uraian di atas bahwa untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas suatu entitas atau suatu pemerintahan harus menerapkan sistem akuntansi keuangan, diduga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpegaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari hal tersebut di atas dapat dibuat suatu hipotesis dalam penelitian sebagai berikut :

H1 : Diduga Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

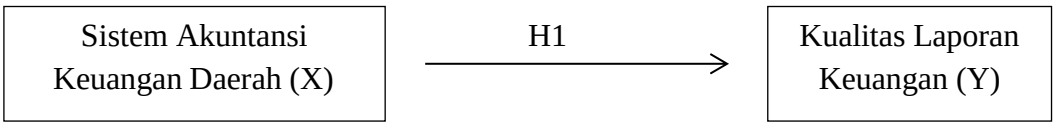

Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2022)

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari variabel penelitian, sebagai mana dijelaskan (Sugiyono, 2016) bahwa hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan dari data yang terkumpul. Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian bahwa hipotesis terdiri dari hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data

sampel). Sedangkan hipotesis alternatif yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu :

H1 : Diduga sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang

2.5. Penelitian Terdahulu

1. Nelly Nur Apandi (2018) **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terahadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.** Dalam rangka menjalankan reformasi secara rnenyeluruh dan wewenang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus menyusun sebuah sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Hal ini ditujukan agar pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipercaya. Namun pada kenyataannya tetap ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan survei analirik. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 24 organisasi perangkat daerah SKPD di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui teknik purposive sampling. Analisis Statistik yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan uji t- statistik dengan tingkat

signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung mendapat hasil sebesar 81,5 % yang tergolong pada interval baik sedangkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung tergolong pada interval sangat baik dengan hasil 86,6%. Sedangkan hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui persamaan regresi Y = 5,867 + 0,462X dengan koefisien determinasi sebesar 78,3% yang berarti bahwa sebesar 78,3% perubahan mengenai kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandrmg dapat diterangkan oleh variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sedangkan sisanya sebesar 21,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Mustika (2020). **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.** Dari hasil uji regresi secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,123 yang berarti nilai Sig. > 0,05. Artinya bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum melakukan penelitian . Dari hasil uji regresi secara parsial (uji t) menunjukkanbahwa variabel penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,013 yang berarti nilai Sig. < 0,05. Artinya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum melakukan penelitian.

3. Fahirah (2019). **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Cianjur).** Kualitas laporan keuangan daerah adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan, transaksi-transaksi dan kinerja suatu pemerintah daerah dimana di dalamnya memiliki informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur dengan menyebarkan kuesioner melalui link google form kepada 78 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 25, metode statistik analisis statistik deskriptif, uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi

klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda serta uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. Aida Nahar (2017). ***The Analysis of Human Resources Policies and Regional Financial Accounting System on Regional Government Financial Statements' Quality*.** Akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi yang dapat memenuhi tujuannya. Untuk dapat memunculkan persyaratan normatif tersebut, karakteristik ini mutlak diperlukan agar

laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan yaitu: relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Populasi penelitian ini adalah PPK-SKPD di Karesidenan Pati. Terdiri dari : Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan berjumlah 113 SKPD dengan 73 responden dengan teknik *random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan sebesar 4,167. Penerapan sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan sebesar 3,309%. Kebijakan sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini tidak berhasil menerima hipotesis 5 terbukti bahwa nilai t = -1.021 dan p = 0.311 yang berarti bahwa audit BPK tidak berpengaruh terhadap hubungan antara Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

5. Zulkfli Fachri (2019). ***Analysis Using Region's Financial Accounting Information System On The Quality Of Local Government Finance Reports.*** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan meliputi relevansi, andal, sebanding, dan dapat dipahami. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi keuangan

daerah. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi teoritis yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber daya yang berhubungan dengan topik dalam suatu penelitian. Data diperoleh dari jurnal, skripsi, buku, dan berbagai literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dimana menurut (Sugiyono, 2016) dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut, jawaban terhadap masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis yang diartikan sebagai jawaban sementara masalah penelitian, variabel kuantitatif adalah variabel yang keadaannya dapat dinyatakan dalam bilangan, dan bilangan tersebut mempunyai arti. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan terbagi dalam dua kelompok yaitu data diskrit yaitu data yang diperoleh melalui hasil proses menghitung atau membilang dan data kontiniu yaitu data yang diperoleh melalui proses mengukur. Dengan variabel yang diteliti yaitu 2 variabel terdiri dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Variabel X) dan Kualitas Laporan Keuangan (Variabel Y).

3.2. Jenis Data

Jenis data yang dimaksud pada setiap penelitian yaitu subjek darimana data tersebut didapatkan dan mempunyai informasi yang jelas terkait bagaimana mengambil data tersebut bagaimana data tersebut diolah. Apabila peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan lisan serta non lisan.

3.2.1. Data Primer

Menurut (Nasution, 2020) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan menurut (Indriantoro & Bambang, 2013) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penyebaran kuesioner. Pada penelitian ini, sumber data didapatkan dari responden dengan menyebarkan kuesioner.

3.2.2. Data Sekunder

Menurut (Narbuko, 2013) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram". Sedangkan menurut (Indriantoro & Bambang, 2013) data sekunder adalah: Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)". Yang dikategorikan sebagai data sekunder, yaitu melalui perpustakaan, website, serta data yang telah tersedia kemudian dipublikasikan kepada pengguna data melalui internet.

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber data primer merupakan data yang langsung dapat dan disajikan sebagai sumber dari penelitian

dan pengamatan secara langsung pada objek tempat melakukan penelitian, dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara langsung. Sedangkan dari definisi sumber data sekunder di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan faktor manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpianang. Berikut jumlah populasi dalam penelitian ini :

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Nama SKPD
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang (BKPSDM)
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang (KESBANGPOLPEMMAS)
3	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang (BLUD RSUD)
4	Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang (BNN)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang (BPBD)

No	Nama SKPD
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang (BPKAD)
7	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang (BPPRD)
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang (BAPELITBANG)
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang (DISBUDPAR)
10	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Tanjungpinang (DISPORA)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang (DISDUKCAPIL)
12	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang (DKP2KB)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang (DISKOMINFO)
14	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (DLH)
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang (PUPR)
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanj (DP3APM)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang (DPMPTSP)
19	Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang (DISDIK)
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (DISPERDAGIN)
21	Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (DISHUB)
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsip Kota Tanjungpinang (DPK)
23	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang (DPPP)
24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpin (PERKIM)
25	Dinas Sosial Kota Tanjungpinang (DINSOS)
26	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang (DTKKUM)
27	Inspektorat Daerah Kota Kota Tanjungpinang (ITDAKO)
28	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang (SATPOL-PP)
29	Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang (SETDAKO)
30	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Tanjungpinang (KORPRI)
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang (KPU)

No	Nama SKPD
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang (DPRD)

Sumber : Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Kota Tanjungpinang (2022)

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasi. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, maka akan ditetapkan dari populasi yang ada. Selanjutnya dalam menentukan sampel, penelitian sampel diserahkan pada pertimbangan-pertimbangan pengumpulan data yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran (PA) atau Pejabat Pengguna Anggaran (PPK). Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non Probability Sampling*. Menurut (Sugiyono, 2012) teknik *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis *Non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh, Menurut sugiyono (2017) pengertian dari sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Maka dari itu sampel yang digunakan adalah berjumlah 32 yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Nama SKPD	Sampel
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang (BKPSDM)	1
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang (KESBANGPOLPEMMAS)	1
3	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang (BLUD RSUD)	1
4	Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang (BNN)	1
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang (BPBD)	1
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang (BPKAD)	1
7	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang (BPPRD)	1
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang (BAPELITBANG)	1
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang (DISBUDPAR)	1
10	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Tanjungpinang (DISPORA)	1
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang (DISDUKCAPIL)	1
12	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang (DKP2KB)	1
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang (DISKOMINFO)	1
14	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (DLH)	1
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang (PUPR)	1
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)	1
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanj (DP3APM)	1
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang (DPMPTSP)	1
19	Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang (DISDIK)	1
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (DISPERDAGIN)	1

No	Nama SKPD	Sampel
21	Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (DISHUB)	1
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsip Kota Tanjungpinang (DPK)	1
23	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang (DPPP)	1
24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpin (PERKIM)	1
25	Dinas Sosial Kota Tanjungpinang (DINSOS)	1
26	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang (DTKKUM)	1
27	Inspektorat Daerah Kota Kota Tanjungpinang (ITDAKO)	1
28	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang (SATPOL-PP)	1
29	Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang (SETDAKO)	1
30	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Tanjungpinang (KORPRI)	1
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang (KPU)	1
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang (DPRD)	1

Sumber : Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Kota Tanjungpinang (2022)

3.4. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan variabel itu sendiri yang diungkap dalam definisi konsep tersebut, baik secara praktik, operasional, nyata dalam ruang objek penelitian atau objek yang diteliti. Oleh karena itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Sebuah definisi variabel yang digolongkan oleh karakteristik-karakteristik variabel yang akan diamati. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan tentan definisi operasional.

Definisi operasional variabel penelitian adalah pengertian dari masing-masing variabel itu sendiri yang menggunakan indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Defisini Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Pelaksanaan 4. Penatausahaan 5. Pelaporan, 6. Pertanggungiawaban Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	1. Andal 2. Relevan 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2022

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data untuk kemudian

diteliti, data-data tersebut dikumpulkan menggunakan dua cara yaitu:

1. Kuesioner

   Kuesioner merupakan alat yang digunakan dalam penelitian berupa butir-butir pertanyaan yang disusun berdasarkan pertanyaan dari indikator variabel dengan beberapa *option* atau pilihan jawaban. Menurut (Sugiyono, 2013) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Tabel 3.4
Kuisioner Penelitian

Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan Pernyataan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)	7. Perencanaan	1 s/d 5
	8. Penganggaran	6 s/d 8
	9. Pelaksanaan	9 s/d 13
	10. Penatausahaan	14 s/d 16
	11. Pelaporan,	17 s/d 18
	12. Pertanggungiawaban Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	19 s/d 20
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	5. Andal	21 s/d 24
	6. Relevan	25 s/d 27
	7. Dapat dibandingkan	28 s/d 30

Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan Pernyataan
	8. Dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	31 s/d 32

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2022

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016), pengolahan data merupakan metode yang bertujuan untuk mengambarkan secara sistematis dan *factual* tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterprestasi data dalam pengujian hipotesis *statistic*. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan *software computer* SPSS *(Statistical Program for Social Science)* versi 25 *for windows* untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.7. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menganalisis data sampel dan hasilnya akan diberlakukan untuk populasi. Menurut (Sugiyono, 2016) dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.

3.7.1. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk signifikansi 5% dari *degre of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung < r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid. (Ghozali, 2011).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji stastik *Cronbach Alpha* (*a).* Suatu konstruk atau variabel dikatakan realiabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60. (Ghozali, 2011).

3.7.2. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk meyakini bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi normalitas, heteroskedastitas, dan uji multikolinieritas.

1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2011). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan pengujian berikut:

a. Uji Kolmogrov Smirnov

Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

1) Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal

2) Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

b. Histogram

Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri berarti data tidak terdistribusi secara normal. (Ghozali, 2011b). Grafik *Normality Probability Plot.*

Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah:

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 3.1
Grafik *P Plot*

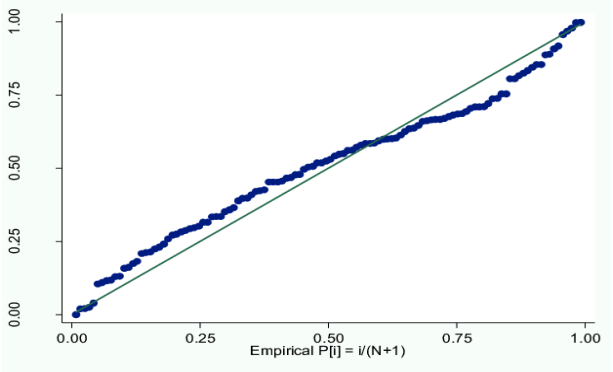

Sumber : Ghozali (2014)

2. Uji Multikolineraritas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Multikolinieritas dapat menyebabkan variabel-variabel independen menjelaskan varians yang sama dalam mengestimasikan variabel dependen. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (dari output komputer program SPSS ver.23.0). Pedoman regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai *VIF*<10 dan mempunyai angka *Tolerance* di atas 0,1 (Ghozali, 2011).

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam (Ghozali, 2011b). Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pemgamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas.

3.7.3. Uji Regresi Sederhana

Analisis dapat dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresinya. Menurut (Sugiyono, 2016) persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel dependen dimanipulasi atau diubah-ubah. Analisis regresi sederhana digunakan sebagai alat untuk mengukur

pengaruh antar variabel independen X (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) dengan variabel dependen Y (Kualitas Laporan Keuangan). Dengan persamaan regresi sederhana yang digunakan dengan rumus analisis regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b X$$

Dimana :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a = Harga Y bila X = 0 (Konstanta)

b = Angka arah atau koefisisien regresi

X = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

3.7.4. Uji Hipotesis

3.7.4.1.Uji (Uji t)

Yaitu suatu uji digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t- tabel.

1. Penentuan Nilai Kritis (t- tabel)

   Untuk menguji hipotesis menggunakan uji – t dengan tingkat signifikan (x) 5%, dengan sampel (n).

2. Kriteria Hipotesis

   Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen

   Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen

a. Jika nilai t hitung > t tabel Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen
b. Jika nilai t hitung < t tabel, Ho diterima dan Ha ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen

3.7.5. Koefisien Determinan (R^2)

Uji R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X.

Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. *Adjusted* R *square* adalah R *square* yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil dari R *square* dari angka ini bisa memiliki ketersedian jasa negatif, bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *Adjusted* R^2 sebagai koefisien determinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. *problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*.

Annisa, Parasayu. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas. Audit*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Bahri, S. 2016. *Pengantar Akuntansi*.

Bastian, B. dan Nurlela. 2013. *Akuntansi Biaya*. Edisi Keem ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Ghozali, I. 2011a. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2011b. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2016a. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2016b. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

H. Edward 2016. Perimbangan Keungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, XLII.

Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. *Salemba Empat*.

Halim, A. & Kusufi, S. 2017. *Teori,Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*.

Haryanto, R.A. 2013. *Strategi Promosi, Kualitas Produk, Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Restoran MCDonald's Manado*. Jurnal Emba.

Indriantoro, N. & Bambang, S. 2013. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Iqbal, M., Rachman, D. & Rodiah, S. 2021. Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12.

Juita, V. 2016. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menghan (UMKM) Sektor Jasa Perdagangan Di Padang, Sumatra Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Terbaru*, 9.

Kasmir 2015. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Krismiaji 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: YKPN.

Mardjono, E.S. & Gamayanto, I. 2013. Parenting Systems untuk Pusat Pertanggungjawaban Akuntansi : Ide Untuk Mengembangkan Hubungan Berbasis Solusi Antara Bawahan Dan Pimpinan Perusahaan. *Media ekonomi & teknologi informasi*.

Misbahuddin & Hasan, I. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi)*. Jakarta: Bumi Askara.

Mulyadi 2016. Sistem Akutansi. *Sistem Akuntansi*.

Munawir, S. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

Narbuko, A. dan 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksra.

Nasution, U.H. 2020. *Struktur Modal*. Medan: Undhar Press.

Prayitno, D. 2012. *Cara Kilat Belajar Analsisi Data Dengan SPSS 20 Edisi Ke Satu*. Yogyakarta: Andi.

Sugiono, A. & Edi, U. 2016. *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

V. Wiratna Sujarweni 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Zulyani 2017. Analisa Prosedur Akuntansi dan Perspektif Manajemen Syariah Pada Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. *ejournal.stiesyariahbengkalis*.

Curriculum Vitae

A. Data Pribadi

Nama	: Zaleha
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjungpinang, 10 Mei 1998
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
E-mail	: Azaleaa889@gmail.com
Alamat	: Perumahan Telaga Bintan Cluster 7 A

B. Riwayat Pendidikan

Tingkat Sekolah	Nama Sekolah
Taman Kanak-kanak	-
Sekolah Dasar	SDN 006 BUKIT BESTARI 2006 – 2012
Sekolah Menengah Pertama	SMPN 12 TANJUNGPINANG 2013 – 2015
Sekolah Menengah Atas	SMKN 1 TANJUNGPINANG 2016 – 2018